



# PENGARUH MANAJEMEN PROYEK SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (SOPD) TERHADAP KINERJA PENGAWASAN DALAM MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Aceng Ulumudin<sup>1</sup>; Ali Erlinawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Dosen Tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut  
[aceng.u@fisip.uniga.ac.id](mailto:aceng.u@fisip.uniga.ac.id)

<sup>2</sup>Dosen Tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut  
[aierlinawati@uniga.ac.id](mailto:aierlinawati@uniga.ac.id)

## Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji Pengaruh Manajemen Proyek Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Terhadap Kinerja Pengawasan Dalam Mewujudkan Efektivitas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Garut. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis statistik dengan model analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen Proyek Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) berpengaruh secara signifikan Terhadap Kinerja Pengawasan Dalam Mewujudkan Efektivitas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Garut.

**Kata kunci:** Manajemen, proyek, Kinerja, Pengawasan.

## 1 Pendahuluan

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia saat ini adalah semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun di daerah. Pada dasarnya akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah daerah harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

Audit terhadap akuntabilitas keuangan meliputi pemeriksaan terhadap kecukupan sistem akuntansi manajemen, prosedur administrasi, dan struktur organisasi pemerintah daerah. Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial (Jones et al., dalam Mardiasmo, 2002:229). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar

menyampai-kannya ke DPRD saja, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah.

Lemahnya manajemen proyek dan rendahnya kualitas pengawasan akhirnya memunculkan kemungkinan *underfinancing* atau *overfinancing*, yang kesemuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas unit-unit kerja pemerintah daerah. dalam pelaksanaan proyek atau program. Pada umumnya, masalah utama yang dihadapi unit kerja yang mengalami *underfinancing* adalah rendahnya kapabilitas program kerja untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan publik. Sedangkan untuk unit kerja yang menikmati *overfinancing*, masalah yang dihadapi adalah efisiensi yang rendah.

## 2 Kajian Teori

Konsep dalam Manajemen Proyek Kezner (dalam Soeharto 2004:34) memberikan pengertian bahwa “manajemen proyek adalah merencanakan, mengorganisir, memimpin dan mengendalikan sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan. Dan kinerja pengawasan merupakan suatu kemampuan dan keahlian seseorang dalam memahami tugas dan fungsinya dalam bekerja (Norton, dalam Iskandar 2005a:105). Pengawasan menurut Siagian (dalam Iskandar, 2005:146) adalah “Proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dikerjakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.

Sedangkan Efektivitas Laporan Keuangan menurut Siagian (2001:7) mendefinisikan efektif dan efektivitas adalah Efektif dapat diartikan pencapaian suatu usaha atau kegiatan yang berencana, dapat diselesaikan tepat pada waktu dengan target yang telah ditentukan. Sedangkan yang dimaksud efektivitas mengandung pengertian suatu kegiatan yang dilaksanakan selalu dapat diselesaikan dengan target yang telah direncanakan.

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan desain kuantitatif. Analisis data menggunakan teknik statistik dengan model analisis jalur (*path analysis*). Populasi penelitian adalah seluruh pegawai Bidang Pendapatan dan Perimbangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Garut. Teknik pengambilan sampel dengan teknik proportional random sampling, pengambilan data menggunakan angket dan wawancara. Jumlah sampel adalah sebanyak 68 orang.

## 4. Hasil dan Implikasi

Pelaksanaan manajemen proyek di DPPKA Kabupaten Garut relatif baik. Hal ini tercermin dari rata-rata jawaban responden sebesar 77,45 %. Walaupun demikian masih terdapat permasalahan pada aspek pelaporan (65,29 %). Masalah pelaporan yang masih ditemukan adalah masalah ketepatan waktu dan keakuratan laporan proyek. Penyerahan laporan seringkali terlambat, dan masih ditemukan ketidak tepatan data laporan dengan fakta di lapangan. Soeharto (2004:34) mengemukakan bahwa untuk mencapai tujuan proyek secara efektif dan efisien maka proyek tersebut harus dikelola dengan sebaik-baiknya yaitu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen modern. Salah satu prinsip yang dimaksud adalah pembuatan laporan yang termasuk ke dalam aktivitas evaluasi. Laporan ini berfungsi untuk menilai sejauhmana

pekerjaan dilakukan sesuai dengan perencanaan. Laporan yang tidak tepat, bila tidak diketahui akan mengakibatkan kesalahan pekerjaan sehingga hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan perencanaan yang pada gilirannya akan mengakibatkan kegagalan suatu proyek.

Rata-rata jawaban responden pada variabel kinerja pengawasan menunjukkan kategori baik yaitu sebesar 75,36 %. Namun ditemukan permasalahan yakni tingkat ketercapaian efisiensi pekerjaan masih relatif rendah (64,41 %). Artinya pengawasan yang telah dilaksanakan belum memberikan efisiensi yang diharapkan. Efisiensi merupakan tujuan dari pengawasan, seperti dikemukakan oleh Winardi (2002:78) bahwa pengawasan itu pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Menurut Komaruddin (2000:56), pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan

Kondisi variabel efektivitas laporan pertanggungjawaban keuangan daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Garut relatif sudah baik namun belum memuaskan, hal ini digambarkan oleh rata-rata jawaban responden pada variabel ini yaitu sebesar 74,87%. Permasalahan yang ditemukan dilapangan adalah belum efektifnya sumberdaya pengelola keuangan, dalam arti sumberdaya pengelola yang ada belum sesuai dengan yang diharapkan, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilannya (70,29%). Iskandar (2005:111) mengatakan "Untuk mencapai tingkat efektivitas kinerja tinggi siapapun yang memiliki atribut individu, harus memiliki kemampuan untuk bekerja, yakni dia harus mengembangkan upaya kerja yang memadai. Upaya kerja membedakan antara bekerja keras dan yang tidak. Kinerja akan bervariasi tergantung dari tingkat motivasinya dalam melakukan pekerjaan. Upaya kerja akan menggambarkan kekuatan dalam diri seseorang yang menyebabkan tingkat, arah dan keteguhan usaha yang dicurahkan dalam pekerjaan. Tapi perlu diingat bahwa motivasi ada pengaruhnya terhadap upaya kerja, tetapi bukan terhadap hasil kerja. Motivasi memprediksi upaya keras yang pada gilirannya berama-sama dengan atribut individu dan dukungan organisasi, memprediksikan kinerja". Laporan keuangan berkaitan erat dengan masalah akuntabilitas, dimana laporan keuangan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Mohamad dkk. (2004:16) berpendapat bahwa akuntabilitas muncul sebagai jawaban terhadap permasalahan information asymmetry. Teori asimetri informasi beranggapan bahwa banyak terjadi kesenjangan informasi antara pihak manajemen yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak konstituen atau masyarakat yang berada di luar manajemen. Scott (dalam Mohamad, 2004:17) menjelaskan bahwa kelanggengan suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan untuk menciptakan informasi yang terbuka, seimbangan dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

## 5. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen Proyek Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) berpengaruh secara signifikan Terhadap Kinerja Pengawasan Dalam Mewujudkan Efektivitas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Garut. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien jalur sebesar 0,51 dan besar pengaruhnya (koefisien determinasi total, R<sup>2</sup>) sebesar 25,11 %. Pengaruh variabel

manajemen proyek terhadap kinerja pengawasan adalah sebesar 42,23 % dan terhadap efektivitas laporan pertanggungjawaban keuangan adalah sebesar 13,91 %. Sedangkan pengaruh kinerja pengawasan terhadap efektivitas laporan adalah sebesar 11,20 %.

## 6. Rekomendasi

Dalam pengerjaan suatu program/kegiatan dalam suatu lembaga pemerintahan maupun swasta maka salah satu indikatornya adalah pengawasan, maka selaku pimpinan dalam suatu lembaga harus dapat mengawasi dengan baik pegawai yang di tugaskannya.

## 7. Ucapan Terima Kasih

Sebagai ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada kepala Dinas dan seluruh staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sudah membantu dalam memberikan informasi dan data penyelesaian penelitian ini

## Daftar Pustaka

- Anondo, Daru. 2004. *Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah sebagai Bagian Perwujudan Akuntabilitas Publik (Studi Kasus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Tesis Program Pasca Sarjana UGM Yogyakarta.
- Iskandar, Jusman. (2010). *Kapita Selekta Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*. Bandung: Puspaga
- Lembaga Administrasi Negara. (2003). *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Mangkunegara, A, Prabu, 2006. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Martani dan Lubis, 2006. *Akuntabilitas dan Aksesibilitas Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Priest, A. N. 2000. *Users of Local Government Annual Reports: Information Preferences. Accounting, Accountability and Performance*, Vol. 5, No 3, pp. 49-62.
- Ryan, Christine; Trevor Stanley dan Morton Nelson. 2002. *Accountability Disclosure by Queensland Local Government Councils: 1997-1999. Financial Accountability & Management*. Vol. 18 (3).
- Shende, Suresh dan Tony Bennett. 2004. *Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Public Financial Administration*. UN DESA. <http://www.unpan.org>
- Siagian, Sondang P. 2001, *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Gunung Agung.